PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ANTI KORUPSI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dewi Yusnita[1], Makhdalena[2], R.M. Riadi[3]

[1,2,3]*Universitas Riau*
E-mail : [1]dewi.yusnita3500@student.unri.ac.id, [2]makhdalena@lecturer.unri.ac.id, [3]m.riadi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of independent commissioners and audit committee competence on anti-corruption disclosure in state-owned enterprises (SOEs) in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2022–2024. This research adopts a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports and sustainability reports, consisting of 42 observations from 14 companies over three years. Data were collected through documentation techniques, and variables were measured using a content analysis approach. The anti-corruption disclosure variable was assessed using an index based on the Global Reporting Initiative (GRI) 205: Anti-Corruption (2016) indicators. Data analysis was conducted using path analysis with the aid of SPSS version 25. The results indicate that, simultaneously, independent commissioners and audit committee competence have a significant influence on anti-corruption disclosure, with a determination coefficient (R^2) of 0.399. Partially (direct effect), independent commissioners have a positive and significant influence ($p = 0.044$), while audit committee competence shows a greater and highly significant influence ($p = 0.000$) on anti-corruption disclosure. The indirect effect of the independent board of commissioners through the competence of the audit committee on anti-corruption disclosure is -0.1848, and the indirect effect of the audit committee competency variable through the independent board of commissioners on anti-corruption disclosure is -0.0761. These findings suggest that strengthening a company's internal oversight structure—both in terms of independence and technical competence—is a key factor in promoting corporate transparency and integrity, particularly in disclosing anti-corruption policies.

Keywords : *Independent Commissioners, Audit Committee Competence, Anti-Corruption Disclosure, State-Owned Enterprises, Good Corporate Governance (GCG).*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah sistemik yang melekat dalam praktik kelembagaan dan tata kelola pemerintahan maupun korporasi. Menurut Transparency International (2024), skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia adalah 37 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Posisi ini menunjukkan bahwa persepsi publik internasional terhadap tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan mengindikasikan lemahnya pengawasan serta akuntabilitas institusional.

Hasil Survey Fraud Indonesia oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia (2019) memperlihatkan bahwa korupsi menempati urutan pertama sebagai jenis fraud yang paling dominan, dengan persentase sebesar 64,4%, diikuti penyalahgunaan aset (28,9%) dan kecurangan laporan keuangan (6,7%). Korupsi juga dianggap sebagai bentuk kecurangan yang paling merugikan, yakni sebesar 69,9%, jauh di atas penyalahgunaan aset (20,9%) dan kecurangan laporan keuangan (9,2%). Temuan tersebut menjadi bukti bahwa korupsi memiliki implikasi destruktif yang signifikan terhadap keuangan negara, integritas lembaga, dan kepercayaan publik (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Ironisnya, salah satu institusi yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, sejak tahun 2019 setidaknya 159 BUMN terjerat dugaan korupsi (Liputan6.com, 2022). Kasus-kasus besar seperti korupsi pengadaan pesawat Bombardier dan ATR oleh PT Garuda Indonesia yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun, serta kasus pengoplosan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan kerugian hingga Rp193,7 triliun (Tempo.co, 2025). Hal ini menjadi bukti nyata bahwa BUMN belum optimal dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG). Meskipun telah ada berbagai regulasi untuk mencegah korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, realisasi di lapangan belum mencerminkan efektivitasnya. Banyak perusahaan belum maksimal dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dua prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang sejatinya mampu mencegah praktik korupsi (Rissdiana & Riduwan, 2023). Salah satu elemen penting GCG dalam upaya pemberantasan korupsi adalah keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan kebijakan anti korupsi dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan anti korupsi bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi merupakan indikator integritas perusahaan dan bentuk tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, *Global Reporting Initiative* (GRI 205:2016) telah menyediakan indikator standar untuk pelaporan antikorupsi, mencakup kebijakan, pelatihan, dan pelaporan insiden. Sayangnya, praktik pengungkapan tersebut belum merata, bahkan di antara perusahaan-perusahaan BUMN. Contohnya, meskipun PT Timah Tbk telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, pada tahun 2024 perusahaan ini tetap tersandung kasus korupsi besar dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun, yang melibatkan Presiden Komisaris-nya (TribunNews, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak cukup tanpa pengawasan yang kuat dan integritas yang melekat dalam budaya organisasi.

Dalam konteks ini, peran dewan komisaris independen menjadi sangat vital. Mereka bertugas mengawasi manajemen secara objektif, memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang bersih. Sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris

independen harus bebas dari afiliasi dengan manajemen dan pemegang saham utama, guna menjamin netralitas dalam pengambilan keputusan. Keberadaan mereka terbukti mendorong penguatan transparansi, termasuk dalam hal pengungkapan kebijakan anti korupsi (Makhdalena, 2012). Selain itu, kompetensi komite audit juga sangat menentukan dalam menjaga kualitas pengawasan internal. Komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan mampu menilai sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan secara objektif (Zahra et al., 2016). Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015, setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki kompetensi tersebut untuk menjamin efektivitas fungsi pengawasan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi. Tirtasari (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi, sedangkan kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Putri dan Yustisi (2022) menemukan bahwa justru komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap transparansi antikorupsi, bukan dewan komisaris independen. Variasi hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks perusahaan milik negara.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen dan kompetensi komite audit terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang peran mekanisme tata kelola internal dalam membentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih tepat dalam upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

METODE

Objek penelitian ini adalah dewan komisaris independent (X_1), kompetensi komite audit(X_2), dan pengungkapan anti korupsi (Y) pada perusahaan BUMN sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun situs perusahaan terkait.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah akhir yang memenuhi kriteria sebanyak 14 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: perusahaan BUMN sektor non-keuangan, terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta memiliki data lengkap terkait dewan komisaris independen, kompetensi komite audit, dan pengungkapan anti korupsi selama tiga tahun pengamatan (2022–2024). Total observasi yang dianalisis adalah sebanyak 42 data.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, sedangkan pengukuran variabel dilakukan melalui pendekatan konten analisis. Variabel pengungkapan anti korupsi diukur menggunakan indeks GRI 205:2016 yang terdiri dari 12 item. Dewan komisaris independen diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris, dengan batas minimal 30%. Kompetensi komite audit diukur berdasarkan persentase anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, pengalaman kerja dan memiliki sertifikasi profesi akuntansi, audit ataupun keuangan. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur (*path analysis*) menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 25 untuk melihat pengaruh langsung dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

HASIL PENELITAIN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel. Statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata, standar deviasi, dan distribusi frekuensi berdasarkan proporsi di atas dan di bawah rata-rata.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Di atas Rata-rata	Di bawah Rata-rata
Dewan Komisaris Independen (X_1)	0,519760	0,1115051	57,1% (8 perusahaan)	42,9% (6 perusahaan)
Kompetensi Komite Audit (X_2)	0,348410	0,1273524	35,7% (5 perusahaan)	64,3% (9 perusahaan)
Pengungkapan Anti Korupsi (Y)	0,380952	0,2680748	50% (7 perusahaan)	50% (7 perusahaan)

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan telah memenuhi batas minimal proporsi dewan komisaris independen yang disyaratkan oleh POJK, yaitu minimal 30% dari total anggota dewan. Namun, untuk kompetensi komite audit, lebih dari separuh perusahaan masih memiliki anggota komite audit dengan latar belakang non-akuntansi/keuangan, yang dapat memengaruhi kualitas pengawasan dan audit internal. Dari segi pengungkapan anti korupsi, perusahaan masih terbagi rata antara yang memiliki tingkat pengungkapan tinggi dan rendah.

Hasil Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Tabel 2. Hasil Uji *Path Analysis*

Variabel	Pengaruh Langsung		Pengaruh Tidak Langsung
	Koefisien Jalur	signifikansi	
Dewan Komisaris Independen	0,269	0,044	-0,1848
Kompetensi Komite Audit	0,653	0,000	-0,0761
Korelasi X_1 dan X_2 = -0,283			
R^2 = 0,399			

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis pada Tabel 2, diketahui bahwa dewan komisaris independen dan kompetensi komite audit secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,399. Artinya, sebesar 39,9% variasi dalam pengungkapan anti korupsi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut secara bersama-sama. Sisanya, sebesar 60,1%, dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Sedangkan secara parsial, pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan anti korupsi adalah sebesar 0,269 dengan nilai signifikansi 0,044 dan pengaruh kompetensi komite audit secara parsial terhadap

pengungkapan anti korupsi adalah sebesar 0,653 dengan nilai signifikansi 0,000. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung yaitu dengan menghitung perkalian antara nilai korelasi antara X_1 dan X_2 × pengaruh langsung X_2 ke Y begitupun sebaliknya. Pengaruh tidak langsung variabel dewan komisaris independen melalui kompetensi komite audit terhadap pengungkapan anti korupsi adalah sebesar -0,1848 dan pengaruh tidak langsung variabel kompetensi komite audit melalui dewan komisaris independen terhadap pengungkapan anti korupsi sebesar -0,0761.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Temuan ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan BUMN sektor non-keuangan (β = 0,269; p = 0,044). Artinya, perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan kebijakan anti korupsi. Hal ini sejalan dengan teori Good Corporate Governance, di mana komisaris independen bertindak sebagai perwakilan pemegang saham minoritas yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi manajemen agar tidak menyimpang dari nilai-nilai integritas perusahaan.

Dukungan dari hasil penelitian sebelumnya juga memperkuat temuan ini. Penelitian oleh Tirtasari (2019) dan Rissdiana & Riduwan (2023) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris dapat meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Keberadaan komisaris independen yang bebas dari hubungan afiliasi dan konflik kepentingan mempermudah pelaksanaan pengawasan objektif terhadap praktik bisnis perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan kebijakan anti korupsi.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Anti Korupsi

Variabel kompetensi komite audit juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan variabel komisaris independen (β = 0,653; p = 0,000). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan lebih cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi secara lengkap dan transparan.

Kompetensi dalam bidang akuntansi dan pengendalian internal memungkinkan anggota komite audit untuk lebih memahami indikator risiko korupsi, mengevaluasi efektivitas sistem pelaporan, serta memberikan rekomendasi strategis dalam hal transparansi dan tata kelola. Penelitian Chandrika (2020) dan Mulyono & Raharja (2023) menyatakan bahwa kompetensi teknis yang tinggi pada komite audit berperan besar dalam mendorong pengungkapan informasi antikorupsi karena mereka dapat memahami laporan keberlanjutan dan mampu menilai kecukupan pengendalian internal.

Pengaruh Simultan Dewan Komisaris Independen dan Kompetensi Komite Audit

Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan komplementer terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan struktur pengawasan perusahaan harus mencakup peningkatan proporsi dewan komisaris independen dan peningkatan kompetensi anggota komite audit. Meskipun demikian, masih ada 39,9% variasi

pengungkapan yang dijelaskan oleh faktor lain, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, sistem whistleblowing, budaya organisasi, dan tekanan eksternal dari pemangku kepentingan.

Penelitian ini memperkuat pentingnya kombinasi antara mekanisme pengawasan formal (independen) dan fungsional (kompetensi teknis) dalam mendukung agenda integritas dan akuntabilitas perusahaan. Dewan komisaris independen memberikan pengawasan dari sisi tata kelola, sementara komite audit memberikan pengawasan dari sisi substansi dan teknis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dan kompetensi komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusahaan BUMN sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Koefisien determinasi sebesar 39,9% menunjukkan bahwa hampir setengah dari variasi dalam pengungkapan anti korupsi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut secara bersama-sama. Secara parsial, dewan komisaris independen terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan mampu meningkatkan objektivitas pengawasan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan antikorupsi.

Sementara itu, kompetensi komite audit menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan komisaris independen. Perusahaan yang memiliki komite audit dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan atau akuntansi cenderung lebih aktif dan terstruktur dalam mengungkapkan kebijakan antikorupsi. Hal ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam struktur pengawasan internal memainkan peran krusial dalam mendukung tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme tata kelola internal, khususnya dalam hal independensi dan kompetensi, sebagai strategi efektif dalam mendorong keterbukaan informasi dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMN.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh dewan komisaris independen dan kompetensi komite audit terhadap pengungkapan anti korupsi pada perusaahn BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka peneliti memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Investor
   Diharapkan bagi investor dan calon investor sebaiknya berinvestasi pada perusahaan yang melakukan pengungkapan anti korupsi. Perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi dalam hal pengungkapan anti korupsi cenderung menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kinerja yang lebih stabil. Selain itu, perusahaan BUMN yang besar dan transparan biasanya juga mampu menghasilkan profit yang lebih tinggi, sehingga investasi pada perusahaan tersebut dapat memberikan potensi keuntungan yang lebih optimal.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
   Pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama disarankan untuk menambah jumlah variabel lain yang berpengaruh terhadap biaya keagenan seperti risiko industri, ukuran perusahaan, dan lain-lain. Sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya.

3. Kepada Guru
   Diharapkan bagi guru mata Pelajaran Ekonomi, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman pelajar mengenai Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, *53*(9), 1–76.

Chandrika, P. F. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kebijakan Anti Korupsi Di Indonesia Sektor Finansial. Skripsi, *Repository Universitas Katolik*.

GRI-205. (2018). Global Reporting Initiative (GRI) 205: Anti Korupsi 2016. In *Global Sustainability Standards Board (GSSB)*.

Liputan6.com. (2022). *Deretan Mega Korupsi BUMN Diungkap Erick Thohir Selama Jadi Menteri*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4857352/deretan-mega-korupsi-bumn-diungkap-erick-thohir-selama-jadi-menteri

Makhdalena. (2012). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komposisi Komite Audit Tergadap Earnings Management (Studi pada Perusahaan Konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, *XVI*(03), 336–349.

Putri, D. D., & Yustisi, Y. P. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *10*(2), 1245–1254. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2683

Mulyono, H. A. D., & Raharja, S. (2023). Determinan Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(2), 515. https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p16

Rissdiana, J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Corporate Governance Dan KarakteristikPerusahaan Terhadap Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*.

Tempo.co. (2025). *Kronologi Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Hampir Rp 200 Triliun*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-korupsi-pertamina-yang-rugikan-negara-hampir-rp-200-triliun-1212348

Tirtasari, I. D. A. (2019). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *17*(1), 1–4.

TribunNews. (2024). *Kronologi Lengkap Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis hingga Sandra Dewi Turut Diperiksa*. Tribun News. https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/04/kronologi-lengkap-korupsi-timah-yang-seret-harvey-moeis-hingga-sandra-dewi-turut-diperiksa

Zahra, S. F., Makhdalena, & Trisnawati, F. (2016). Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 S.D 2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, *3*(2), 1–11.